

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE  
(E-PPID) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN  
KERINCI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik Universitas Andalas*



**OLEH:**

**INDAH MAYUNI PUTRI  
2010841027**

**Dibimbing Oleh :**

**Kusdarini, S.IP, M.PA  
Nila Wahyuni, S.AP, M.AP**

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2025**

## ABSTRAK

**Indah Mayuni Putri, 2010841027, Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Berbasis Website (E-PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2025.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Berbasis Website (E-PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya transparansi dan akuntabilitas informasi publik dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan partisipatif. Di era digital, E-PPID menjadi sarana yang efektif untuk memenuhi kebutuhan informasi publik yang cepat, tepat, dan transparan. Namun, terdapat tantangan dalam pengelolaannya, baik dari aspek teknologi maupun sumber daya manusia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, dengan triangulasi sumber data. Analisis hasil temuan penelitian dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edwards III, dengan empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan variable teori Edward III, ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik berbasis website (E-PPID) di KPU Kabupaten Kerinci masih menghadapi berbagai kendala. Komunikasi antar bagian belum berjalan optimal, yang menyebabkan informasi di website tidak lengkap dan tidak selalu diperbarui tepat waktu. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menghambat pengelolaan informasi secara efektif, sementara kurangnya pemahaman tentang tujuan kebijakan serta minimnya insentif bagi pelaksana kebijakan mengurangi motivasi kerja. Selain itu, meskipun struktur birokrasi sudah ada, koordinasi antar bagian masih belum maksimal, yang menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan kebijakan.

**Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, PPID**

## ABSTRACT

**Indah Mayuni Putri, 2010841027, Implementation of Website-Based Public Information Management and Service (E-PPID) Policy at the Kerinci Regency General Election Commission, Department of Public Administration, Social and Political Sciences, Andalas University, 2025.**

This research aims to describe the Implementation of Website-Based Public Information Management and Service Policy (E-PPID) at the Kerinci Regency General Election Commission. This research is motivated by the importance of transparency and accountability of public information in supporting the implementation of democratic and participatory elections. In the digital era, E-PPID is an effective means of meeting public information needs that are fast, precise and transparent. However, there are challenges in managing it, both from the technological and human resource aspects.

This research uses a qualitative approach with a descriptive research design. Data collection was carried out using interview techniques, observation and documentation. The selection of research informants used a purposive sampling technique, with triangulation of data sources. Analysis of the research findings was carried out using policy implementation theory by Edwards III, with four variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

Based on the results of research analyzed using Edward III's theoretical variables, it was found that the implementation of management policies and website-based public information services (EPPID) in the Kerinci Regency KPU still faces various obstacles. Communication between departments is not running optimally, which causes the information on the website to be incomplete and not always updated on time. Limited human resources and budget hinder effective information management, while a lack of understanding of policy objectives and minimal incentives for policy implementers reduce work motivation. In addition, even though a bureaucratic structure already exists, coordination between departments is still not optimal, which causes inefficiencies in policy implementation.

**Keywords: Implementation, Public Services, PPID**